

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Kepemimpinan

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Warren Bennis, maka jika dihayati secara mendalam, sesungguhnya kepemimpinan itu sulit untuk diberikan definisi yang definitif karena hanya dapat diketahui ketika memperhatikan sesuatu yang dikerjakan pemimpin dan keberhasilannya mencapai yang diharapkan.¹⁰ Dengan kata lain, pemimpin dapat dikatakan menjalankan kepemimpinannya apabila ada tindakan (*actiori*) yang dilakukan dan pencapaiannya (*goal*) tentunya tidak terlepas dari proses. Karena itu, kepemimpinan dapat dimengerti sebagai suatu proses untuk mempengaruhi orang lain supaya bergerak atau bertindak dalam rangka untuk mengejar suatu cita-cita yang ideal.

Dalam buku yang bertajuk *Primal Leadership: Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi*, hasil karya Daniel Goleman, Richard Boyatzis, dan Annie McKee, mengatakan bahwa pemimpin yang besar adalah pemimpin yang bekerja dengan melibatkan kecerdasan emosi. Menurutnya, kepala suku atau kepala adat mendapatkan kedudukan di dalam masyarakat karena mereka memiliki kemampuan menggerakkan emosi kolektif. Tugas kepemimpinan adalah menggerakkan emosi kolektif ke arah yang positif, dengan kata lain, pemimpin mesti memiliki kemampuan dalam “mempermainkan” emosi setiap orang.¹¹ Disinilah letak peran pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan dalam mengarahkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Keberhasilan pemimpin dalam mempengaruhi masyarakat ditentukan

¹⁰ W.I.M. Poli. *Kepemimpinan Strategis: Pelajaran dari Yunani Kuno hingga Tana Toraja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), hlm. ix.

¹¹ Daniel Goleman, Richard Boyatzis, dan Annie McKee. *Primal Leadership: Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 3-5.

bagaimana menjalankan kepemimpinan dengan menggunakan kecerdasan emosinya untuk mempengaruhi emosi masyarakat kemudian mengolahnya untuk diarahkan ke tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

Pemimpin dapat di personifikasikan sebagai “sang magnet” yang dapat menarik emosi orang-orang lain, sehingga orang-orang tersebut turut merasakan apa yang dirasakan sang pemimpin.^{12 3} Kata kuncinya adalah kemampuan untuk mengelola emosi. Sedangkan dari sudut pandang Poli yang mengatakan bahwa ada dua sumber kekuatan pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang-orang disekitarnya yaitu, kewibawaan dan kewenangan. Kedua kekuatan ini tidak terpisahkan, melainkan menyatu, tetapi jika terdapat pemimpin-pemimpin yang menyalahgunakan kewenangannya atau kekuasaannya, maka pasti kewibawaan itu akan hilang. Akibatnya kepercayaan, penghargaan dan ketaatan dalam proses kepemimpinan akan memudar, sehingga terjadi krisis kepemimpinan . Karena itu, pemimpin mesti menjaga kewibawaannya dalam masyarakat supaya masyarakat tidak skeptis terhadap pemimpin, melainkan kepercayaan, penghargaan dan ketaatan masyarakat terhadap pemimpin tumbuh dan terjaga.

Menjadi pemimpin adalah suatu sikap yang mulia. Karena di situ, pemimpin menangkap sebuah visi yang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh salah satu tokoh inspiratif yang terkenal dengan perjuangannya, yaitu Mahadma Ghandi. Ghandi menangkap sebuah visi untuk memperjuangkan kemerdekaan India dari kolonialisme Inggris dengan cara tanpa kekerasan. Melihat contoh perjuangan Ghandi, maka tepatlah yang

²*ibid*, 10.

¹³W.I.M. Poli. *Kepemimpinan Strategis: Pelajaran dari Yunani Kuno hingga Tana Toraja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), hlm. 4-5.

dikatakan Warren Bennis, bahwa kepemimpinan itu dipahami lewat *action* pemimpin. Dan *action* tersebut timbul dari sebuah visi.

Jika kepemimpinan itu, dipahami sebagai suatu langkah mempengaruhi orang lain, demi untuk mencapai tujuan bersama, kebaikan bersama, membangun kersejahteraan dan harmonis maka ambisi pemimpin mesti dihilangkan. Karena pemimpin itu, memperjuangkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Dengan pengaruh itulah pemimpin menjalankan kepemimpinannya. Karena tanpa pengaruh, pemimpin akan sulit untuk menggerakkan orang lain atau masyarakat dalam rangka untuk mencapai sesuatu yang di harapkan.

Walter Wright mendefinisikan kepemimpinan sebagai sebuah hubungan dengan orang lain untuk mempengaruhi perilaku, nilai-nilai, atau sikap mereka.¹⁴ Pemimpin yang sejati dan yang menjamin keberhasilannya dalam memimpin adalah mereka yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Karena manusia itu adalah makhluk sosial (*homo socius*) maka tentunya dibutuhkan kepemimpinan. Jalannya kepemimpinan tersebut di tentukan oleh munculnya pemimpin-pemimpin yang dapat mengendalikan atau mengarahkan kehidupan warga masyarakat ke arah yang lebih baik dan benar.¹⁵ Menurut Koentjaraningrat, pengaruh yang besar itu dapat terjadi, apabila pemimpin memiliki beberapa sifat diantara ketujuh sifat dibawah ini, yaitu:¹⁶

1. Sifat yang di kagumi masyarakat pada umumnya;
2. Sifat yang menjadi harapan bagi kebanyakan warga masyarakat, karenanya suka ditiru;

¹ “Eddie Gibbs. *Kepemimpinan Gereja Masa Mendatang: Membentuk dan Memperbaharui Kepemimpinan yang Mampu Bertahan dalam Zaman yang Berubah*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2010) hlm. 21.

¹⁵ Simplesius Sandur. *Filsafat Politik & Hukum THOMAS AOUINAS*, (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hlm. 208.

¹⁶ Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1990), hlm. 200.

3. Kemahiran/ keterampilan yang diperlukan dan diakui oleh masyarakat;
4. Sah atau resmi berdasarkan prosedural sebagaimana yang telah ditetapkan oleh adat masyarakat yang bersangkutan;
5. Sifat keramat berdasarkan pandangan umum dalam masyarakat;
6. Lambang/ simbol pimpinan resmi atau sah yang telah ditentukan oleh adat dalam masyarakat;
7. Kemampuan dalam mempergunakan kekuatan fisik.

Menurut Koentjaraningrat pemimpin dalam masyarakat sebisa mungkin memiliki ketujuh sifat-sifat yang telah disebutkan diatas supaya memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat,¹⁷ namun dalam masyarakat modem yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sifat ke lima dan ke tujuh sudah tidak relevan untuk diterapkan. Supaya pengaruh itu semakin nyata dalam tindakan, maka pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya tidak cukup hanya dengan kemahiran mengelolah tugas, tetapi mesti disertai dengan kemahiran dalam hal mengelola orang-orang yang dipimpinnya.

B. Filosofi *Tallu Batu Lalikan*

Sulit untuk mengidentifikasi dengan pasti mengenai kapan tepatnya penggunaan pertama kali atau yang memperkenalkan pertama kali istilah *Tallu Batu Lalikan* yang dilekatkan dengan tiga komponen utama sebagai penopang masyarakat, yaitu: Tokoh Adat, Pemerintah, dan Tokoh Agama (Gereja). Namun dalam buku *Toraya Ma'kombongan* (Toraja Bermusyawah) istilah *Tallu Batu Lalikan* mengacu pada dapur tradisional Toraja dimana ada tiga batuh yang mesti memiliki ukuran yang sama, posisi tepat dengan jarak yang terukur

¹¹ *Ibid*, 202.

agar belanga dapat dengan seimbang jika di tempatkan atas ketiga batu yang telah di konstruksi tersebut. Ketiga batu tersebut dimaknai sebagai komponen penopang masyarakat, yaitu: Tokoh Adat, Pemerintah, dan Tokoh Agama (Gereja). Jika ketiga pilar atau penopang masyarakat tersebut saling mendukung atau saling menghargai, bersinergi niscaya kehidupan masyarakat akan stabil dan harmoni. Tiga komponen atau pilar penopang dalam masyarakat tersebut, yang kemudian akan disebut sebagai kepemimpinan *Tallu Batu Lalikan* (Tokoh Adat, Pemerintah, dan Tokoh Agama/Gereja) yang diharapkan dapat berperan dalam mengatasi penyakit sosial dalam masyarakat agar tercipta kestabilan sosial yang pada gilirannya akan menghasilkan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Disebut sebagai tokoh, karena kepemimpinan yang potensial itu, atau yang menjalankan kepemimpinan itu tentu berawal dari pemimpin. Berbicara mengenai pemimpin tentu menunjuk pada oknum. Oknum inilah yang kemudian disebut sebagai tokoh. Disebut sebagai tokoh karena memiliki peran yang menonjol dalam masyarakat atau memiliki suatu daya tarik dalam masyarakat dalam menjalankan kepemimpinannya. Karena itu, kepemimpinan *Tallu Batu Lalikan* mengarah pada tokoh-tokoh tiga komponen atau pilar penopang dalam masyarakat. Disebut sebagai kepemimpinan karena tokoh-tokoh dari ketiga komponen atau pilar tersebut mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Karena kunci utama dari kepemimpinan adalah pengaruh dan tindakan. Filosofis kepemimpinan dalam tulisan ini adalah “pelayan-gembala”. Dengan demikian, kepemimpinan *Tallu Batu Lalikan* memiliki fungsi sebagai “pelayan-gembala”. Disebut sebagai *Tallu Batu Lalikan* berarti baik Tokoh Adat, Pemerintah, dan Tokoh Agama (Gereja) mesti berdiri bersama-sama, saling mendukung dan menopang, bersinergi atau bermitra dalam menjalankan peran kepemimpinannya sebagai pemimpin yang

akan menjaga keseimbangan masyarakat agar tercipta harmoni dan kesejahteraan. Mereka tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama menjaga dan memelihara kedamaian dan ketentraman warga masyarakat Toraja. Apabila, salah satu di antara tiga pilar atau penopang kestabilan sosial kemasyarakatan tersebut saling berlawanan atau bersilang pendapat atau dengan kata lain tidak bersinergi, maka niscaya kestabilan sosial kemasyarakatan terganggu atau tidak seimbang. Dengan demikian, pada giliran selanjutnya akan berdampak pada lahirnya ketidakharmonisan dan ketidaksejahteraan kehidupan sosial kemasyarakatan. Karena itulah, Tokoh Adat, Pemerintah, dan Tokoh Agama (Gereja) mesti bersinergi atau bermitra, saling menghormati dalam menjalankan kepemimpinannya.

C. Landasan Teologi Alkitabiah Tentang Kepemimpinan

Tuhan Allah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan, dibalik penciptaan tersebut ada maksud Tuhan Allah yang di mandatkan kepada manusia. Manusia adalah kawan sekerja Tuhan Allah di dunia untuk mengusahakan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik dan benar. Sehingga pada akhirnya kehidupan diperuntukkan hanya oleh kehormatan dan kemuliaan Tuhan Allah. Pada bagian ini kepemimpinan akan di kaji dari sudut pandang teologi Alkitabiah. Karena itu, kepemimpinan akan di dalam berdasar Perjanjian Lama (PL) dan Perjanjian Baru (PB).

1. Kepemimpinan berdasarkan Perjanjian Lama (PL)

Hukum, perintah dan tata tertib, diketahui dalam kitab PL bahwa Tuhan Allah yang langsung memperkenalkan dan memberlakukannya kepada umat manusia. Sesungguhnya ketika Tuhan Allah, menempatkan manusia dalam taman Eden ada hukum, perintah dan tata tertib yang mesti di patuhi. Namun sayangnya manusia memiliki kecenderungan

untuk melanggar hukum, perintah dan tata tertib. Akibatnya manusia mengalami malapetaka. Apakah ketika manusia melanggar, Tuhan Allah menghapus hukum, perintah dan tata tertib? Tentu tidak. Tuhan Allah tetap memberlakukan hukum, perintah dan tata tertib dalam kehidupan umat manusia agar terwujud keteraturan, kemaslahatan, kesejahteraan, keharmonisan dan kestabilan sosial kemasyarakatan. Supaya hukum, perintah dan tata tertib di tegakkan dalam kehidupan umat manusia, maka Tuhan Allah mengambil inisiatif untuk mencari dan memilih pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan benar. Karena itulah, umat manusia kawan sekerja Tuhan Allah dalam dunia.

Dalam Kitab PL akan banyak dijumpai bahwa Tuhan Allah sering mengambil inisiatif untuk mencari pemimpin-pemimpin yang dapat di percaya untuk melaksanakan kepemimpinannya dengan baik dan benar atau sesuai dengan standar yang sudah di tentukan oleh Tuhan Allah. Itu dapat di alami dengan membaca dan menghayati cerita sosok Yusuf, Musa, Yosua, Salomo, Daud, Zerubabel, Esra, Nehemia dan nama-nama lain yang tampil sebagai pemimpin-pemimpin dalam PL untuk melaksanakan kepemimpinan dan menyuarakan suara kenabian. Mereka melaksanakan kepemimpinannya berdasarkan petunjuk dari Tuhan Allah. Petunjuk Tuhan Allah diperoleh melalui kontemplasi yang mendalam, doa, puasa dan mimpi.

Dengan demikian, dalam menjalani hidup ini, tidak terlepas dari hukum, perintah dan tata tertib untuk menciptakan keteraturan hidup, kemaslahatan, kesejahteraan, keharmonisan dan kestabilan sosial kemasyarakatan. Meskipun begitu, umat manusia tetap .saja memiliki kecenderungan melanggar hukum, perintah dan tata tertib yang diberlakukan. Karena itu, mesti ada pemimpin-pemimpin yang tenis tampil serta dapat

dipercaya untuk menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan benar, menyuarakan suara kenabian, serta memberlakukan hukum, perintah dan tata tertib sesuai dengan firman Allah.

Dengan inisiatif dan intervensi langsung dari Tuhan Allah untuk menentukan pemimpin-pemimpin dalam PL agar menjalankan kepemimpinan sesungguhnya menandakan bahwa umat manusia merupakan kawan sekerja Tuhan Allah untuk mengelola dan memimpin kehidupan menjadi lebih baik dan benar. Serta Tuhan Allah sesungguhnya menghendaki supaya umat manusia menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan benar. Dengan demikian, hakikat dari pada kehidupan ini adalah menjalankan kepemimpinan agar tercipta atau terbentuk kepemimpinan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam kehidupan setiap individu. Serta hakikat daripada kepemimpinan adalah mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah dan juga kepemimpinan dilakukan semuanya tertuju pada hormat dan kemuliaan Tuhan Allah dan bukan mencari-cari nama atau keuntungan pribadi.

Mengapa kepemimpinan itu dirasa sangat penting? Amsal 11:14 menyampaikan bahwa:

“Jikalau tidak ada pimpinan, jatulah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada ”

Ini berarti kepemimpinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Karena tanpa kepemimpinan maka keteraturan kemaslahatan, kesejahteraan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan akan sulit tercapai. Pertanyaannya kepemimpinan seperti apakah yang dibutuhkan agar keteraturan,

kemaslahatan, kesejahteraan, keharmonisan dan kestabilan benar-benar dapat dimanifestasikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan?

“Di samping itu kaucarilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap; tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin limah puluh orang dan pemimpin sepuluh orang” (Keluaran 18:21) dan Keluaran 23:8, tertulis demikian: "Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar”.

Inilah pemimpin yang ideal dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni takut kepada Tuhan Allah berarti menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan benar dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah, serta tujuan daripada kepemimpinannya adalah untuk kehormatan dan kemuliaan Tuhan Allah. Untuk itu, pemimpin yang takut akan Tuhan Allah, niscaya tidak akan mengejar suap atau tidak menyuap. Karena kepemimpinan itu, tujuannya bukan untuk mencari popularitas dan keuntungan pribadi. Melainkan untuk menciptakan keteraturan hidup, kemaslahatan sosial, kesejahteraan dan keharmonisan sosial kemasyarakatan. Hanya dengan demikianlah pemimpin-pemimpin yang tampil dalam masyarakat untuk menjalankan kepemimpinan dapat dipercaya.

2. Kepemimpinan berdasarkan Perjanjian Baru (PB)

Kepemimpinan yang akan disoroti dalam Kitab PB adalah kepemimpinan yang diperkenalkan oleh Yesus. Kepemimpinan yang diperkenalkan oleh Yesus adalah kepemimpinan sebagai “pelayan atau hamba” (Mrk. 10:42-45) dan sebagai “gembala” (Yoh. 10:10-11), (Yoh. 21:15-17) dan (1 Petrus 5:2).

Dalam menjalankan kepemimpinan sebagai pelayan mesti mengedepankan prinsip kerendahan hati dan secara teologis kepemimpinan itu mengacu pada Inkarnasi Yesus Kristus dengan spiritualitas *kenosis*, yakni pengosongan diri, artinya sepenuhnya bergantung pada kehendak Tuhan Allah dan tidak mencari keuntungan pribadi (Filipi 2:1-8) dan (Filipi 1:9-11). Dengan demikian kepemimpinan itu, mesti menghasilkan buah-buah yang baik dan benar dan mengikuti teladan Yesus Kristus.

Telah diuraikan kepemimpinan secara teologis berdasarkan sudut pandang Alkitabiah. Karena itu, telah di temukan hakikat daripada kepemimpinan. Maka, model kepemimpinan yang dipakai dalam kajian ini adalah model kepemimpinan sebagai pelayan dan gembala. Karena baik kitab PL maupun PB sesungguhnya telah mengajarkan kepemimpinan sebagai pelayan dan gembala dengan prinsip kerendahan hati. Hanya dengan menjalankan kepemimpinan sebagai pelayan dan gembala, maka keteralutan, kemaslahatan, kesejahteraan, keharmonisan dan kestabilan sosial, niscaya akan dapat diwujudkan nyata dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sehingga pada akhirnya kepemimpinan dalam kehidupan ini mengarah pada hormat dan kemuliaan Tuhan ^\lah.

D. Peran Kepemimpinan Sebagai Pelayan dan Gembala

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu arti dari peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁹ Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang atau suatu tindakan yang diharapkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan atau status sosial yang penting dalam masyarakat.^{20 21}

Jika dihubungkan dengan kepemimpinan, maka peran kepemimpinan dapat di pahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya.

Hakikat daripada kepemimpinan memiliki dua fungsi dalam masyarakat, yaitu:

1. Pelayan: Sebagai pelayan berarti melayani dengan adil tanpa membeda-bedakan atau dengan kata lain tidak tebang pilih dalam pelayanan sosial kemasyarakatan. Pelayanan sosial harus benar-benar objektif dan tepat sasaran. Dalam pandangan Thomas Aquinas, keadilan adalah memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang benar. Dengan demikian, keadilan merupakan suatu keutamaan moral dalam hubungan atau relasi dengan orang lain. Tidak memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya merupakan tindakan ketidak adilan, karenanya itu merupakan lawan dari keadilan. Dalam menjalankan kepemimpinan mesti mengedepankan pelayanan dengan prinsip kerendahan hati.

¹⁹<https://lektur.id>, di akses pada tanggal 18 Juni 2020.

²⁰<https://pcndidikan.co.id>, di akses pada tanggal 18 Juni 2020.

²¹Simplesius Sandur. *Filsafat Politik & Hukum THOMAS AQUINAS*, (Yogyakarta: Kanisius» 2019), hlm.

2. Gembala: Sebagai gembala berarti memelihara, menjaga, membimbing dan berkorban bagi orang-orang yang dipimpinnya agar menikmati hidup dalam kelimpahan (Mazmur 23:1-6). Dan apabila ada seseorang dalam masyarakat yang mengalami kemerosotan moral, maka sang gembala mengambil peran untuk membina atau mendidik, bukannya dibiarkan atau ditinggalkan.

Dalam kaitannya dengan peran, maka pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya memiliki peran sebagai pelayan dan gembala. Berikut, di bawah ini akan di uraikan, yakni:

1. Peran pemimpin sebagai pelayan, yaitu:

- a. Melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk kepentingan orang-orang yang dilayani tanpa “pandang bulu” dan tanpa mencari-cari keuntungan.
- b. Mengambil inisiatif dalam rangka mengerjakan sesuatu atau memperbaiki keadaan/kondisi menjadi lebih baik dan benar.
- c. Memperhatikan dengan teliti dan cermat keberadaan dan perkembangan orang-orang yang dipimpinnya.
- d. Memediasi orang-orang yang berselisih atau bersengketa dan merukunkannya.
- e. Membantu orang-orang menemukan dan mengembangkan potensinya.
- f. Memberikan pujian dan penghargaan (insentif) kepada orang-orang yang memiliki prestasi.

2. Peran pemimpin sebagai gembala, yaitu:

- a. Mengetahui dan memahami orang yang dipimpinnya.
- b. Membina hubungan yang baik dan benar dengan semangat persaudaraan dan persahabatan.
- c. Melakukan dan menegakkan keadilan dan kebenaran.

- d. Berkorban dengan kelulusan hati kepada orang-orang yang dipimpinnya.
- e. Menjaga dan membimbing orang-orang yang dipimpinnya.
- f. Berusaha menyadarkan orang-orang yang dipimpinnya karena kelakuan yang tidak baik dan tidak benar.
- g. Menjadi teladan dalam segala hal.

Peran pemimpin sebagai pelayan dan gembala tidak dapat dipisahkan, keduanya mesti menyatu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat di pisahkan. Disamping melayani juga mengembalakan (menjaga, membimbing, membina, dan berkorban) bagi orang-orang yang dipimpinnya. Melayani saja tidak cukup tanpa mengembalakan, karena itu, keduanya terikat tidak terpisahkan dalam rangka menjalankan kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai pelayan dan gembala juga mesti dikembangkan dalam segala sistem kehidupan. Supaya kehidupan yang harmonis dan sejahtera dapat tercapai.

Supaya kepemimpinan sebagai pelayan dan gembala itu efektif, maka mesti memiliki tiga hal yang mendasar dimana salah satunya tidak boleh di abaikan, karena ketiganya saling melengkapi agar kepemimpinan dapat berjalan lebih efektif, baik, dan benar, diantaranya, yaitu:

- a. Kecerdasan intelektual: Memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan perencanaan yang strategis yakni kemampuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang.
- b. Kecerdasan emosi: Memiliki kemampuan mengelola emosi baik emosi diri sendiri maupun emosi orang-orang yang dipimpin untuk di arahkan ke hal-hal yang lebih

positif. Kecerdasan emosi juga akan membangkitkan gema kepemimpinan dan

memunculkan kewibawaan dalam memimpin.

- c. Kecerdasan spiritual: Memiliki kecerdasan jiwa dalam rangka untuk mengembangkan sifat-sifat yang positif seperti integritas, kemampuan berkontemplasi, dan kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi segala sesuatu seperti penderitaan atau kegagalan. Kecerdasan spiritual juga akan membantu dalam mengembangkan sifat-sifat yang optimis dalam menghadapi berbagai tantangan.

Teori yang digagas oleh Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie Mckee bertajuk *Primal Leadership, Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi*, menekankan peranan kecerdasan emosi sangat vital dalam menjalankan kepemimpinan. Karena itu, di dalam buku tersebut mengatakan bahwa hanya memiliki kecerdasan intelek saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang menjadi pemimpin atau menjadi pemimpin yang efektif. Kecerdasan intelek hanya diperuntukkan untuk melayani. Karena itu, kecerdasan intelek membutuhkan kecerdasan emosi. Karena kecerdasan emosi jauh lebih kuat dalam menjalankan kepemimpinan.²² Dengan demikian, untuk menjadi pemimpin yang efektif, maka mesti memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi.

Melihat lebih jauh lagi, maka kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi mesti diperlengkapi dengan kecerdasan spiritual dalam rangka menjalankan kepemimpinan maupun mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang akan menjalankan kepemimpinan secara efektif. Pada point A di atas telah di singgung sosok pemimpin yang inspiratif yakni Mahatma Ghandi. Ghandi menjadi sosok pemimpin yang juga dikenal dunia, karena

²²Daniel Goleman, Richard Boyatzis, dan Annie Mckee. *Primal Leadership: Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 30-31.

perjuangannya dalam menempuh kemerdekaan India dari kolonialisme Inggris pada abad ke-20 tanpa kekerasan.²² Tentu perjuangan tanpa kekerasan tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Karena kemampuannya dalam berkontemplasi, kemampuannya mengembangkan sifat-sifat yang positif, dan kemampuannya bertahan dalam segala penderitaan dan kegagalan yang di hadapi.

Peran pemimpin sebagai pelayan dan gembala mesti memiliki atau melibatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual dalam menjalankan kepemimpinannya. Karena, tiga aspek tersebut saling melengkapi. Apalagi dalam menyikapi berbagai penyakit-penyakit sosial, maka kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual sangat diperlukan oleh pemimpin, khususnya dalam mengantisipasi (mencegah) dan menangani berbagai penyakit sosial yang rentan mengganggu keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat.

Model peran kepemimpinan sebagai pelayan dan gembala dengan tindakan antisipatif (pencegahan) dan penanganan/menangani terjadinya penyakit sosial akan memperlihatkan sejauh mana pemimpin-pemimpin dapat menjalankan kepemimpinannya secara efektif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi, dalam menjalankan kepemimpinan, tidak hanya cukup bila mengantisipasi penyakit sosial tanpa bersiap-siap untuk menangani penyakit sosial tersebut. Karena penyakit sosial itu rumit dan kompleks, maka pemimpin-pemimpin mesti memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual supaya dalam menjalankan kepemimpinan dapat lebih efektif, baik dan benar dalam menata, menjaga, dan membimbing kehidupan sosial kemasyarakatan.

²³Lih. Anom Whani Wicaksana. *Mahatma Ghandi: Inspirasi tentang Perjuangan Hidup yang Penuh Kejujuran dan Kesederhanaan*, (Diterbitkan oleh: C-KJik Media, 2019).

E. Kepemimpinan yang Efektif di Toraja

Untuk bisa menjalankan kepemimpinan yang efektif di Toraja, maka mesti memahami karakteristik orang Toraja dan nilai-nilai yang mempersatukannya. Karena, dalam menjalankan kepemimpinan memang mesti sesuai dengan konteks. Tindakan yang di tempuh mesti memperhatikan konteks. Dengan kata lain konteks yang menentukan tindakan apa yang relevan dalam menjalankan kepemimpinan dan bukannya tindakan yang menentukan konteks. Untuk itu, dalam menjalankan kepemimpinan di Toraja, perlu memahami orang Toraja secara mendalam berdasarkan adat-budaya atau nilai-nilai yang mempersatukannya. Supaya kepemimpinan akan efektif dalam mengupayakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang baik, benar, sejahtera, harmoni dan stabil.

Untuk memahami konteks Toraja dalam menjalankan kepemimpinan, maka yang perlu di perhatikan dan dipahami adalah *aluk* (agama) dan *ada'* (adat-budaya) tradisional masyarakat Toraja. Meskipun telah beragam pola kehidupan yang masuk ke Toraja dan juga orang Toraja telah menjadi Kristen, namun tidak dapat disangkal bahwa orang Toraja masi terpengaruh dengan ikatan adat-budaya Toraja.²⁴ Secara mitologis, kepercayaan tradisional Toraja berpengaruh besar dalam menata komunitas baik sebelum Injil masuk ke Toraja, maupun selehanya, bahkan sampai saat ini terus terpelihara melalui wejangan, tari-tarian, ukiran-ukiran (*passura'* yang terdapat pada *tongkonan* dan *alang'*) dan melalui pelaksanaan ritus-ritus.²³ Karenanya, apabila terdapat hal-hal yang di soroti dalam masyarakat seperti judi adu kerbau dan judi sabung ayam seringkali mencari dalil dari adat-budaya Toraja. Memang penggunaan mitos dalam kehidupan ini masih memiliki peran penting, secara khusus dalam

²³Andarias Kabanga'. *Manusia Mati Seutuhnya*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002) hlm. 293.

²⁴*ibid*, 10.

menjalankan kepemimpinan. Mengelola mitos yang positif dalam kepemimpinan, yakni mitos yang mendukung resonansi dan kecerdasan emosi dapat menjadi dorongan yang kuat terjadinya perubahan/ Penggunaan mitos dan simbol kepemimpinan memang sangat penting untuk di terapkan dalam menjalankan kepemimpinan.

Dalam masyarakat tradisional Toraja memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi atau perorangan/ Karena itu, persekutuan, saling menghormati, saling tolong-menolong, berjalan dalam gerak kebersamaan adalah nilai yang penting dalam membangun relasi agar terwujud kesejahteraan, harmoni dan kestabilan sosial kemasyarakatan

Persekutuan, persatuan dan berjalan dalam gerak kebersamaan dapat juga ditelusuri dalam perjuangan orang Toraja ketika menghadapi pasukan Bugis dimana puncaknya sekitar abad ke-17 para pemimpin-pemimpin desa membentuk aliansi yang dikenal dengan semboyan *Basse Lepongan Bulan* (Aliansi Sebulat Bulan) dalam rangka untuk mengawasi, memantau, membentengi dan melawan penaglukan wilayah Toraja yang akan diluncurkan oleh serangan raja Bone, Arung Palakka.” Aliansi tersebut berhasil dalam melawan serangan yang diluncurkan oleh raja Bone dengan maksud ingin menguasai wilayah Toraja. Karena itulah, dalam membahas persoalan-persoalan, memang mesti bermusyawarah untuk membentuk aliansi dalam rangka mengantisipasi (mencegah) atau menangani berbagai hal-hal yang mengancam kesejahteraan, keharmonisan dan kestabilan sosial masyarakat Toraja.

²⁶Daniel Goleman, Richard Boyatzis, dan Annie Mckee. *P r intai Leadership: Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 267.

²⁷Theodorus Kobong. *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Konteks tual isasi, Transformasi*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), hlm. 26.

²⁸Terance W. Bigalke. *Sejarah Sosial Tana Toraja*, (Yogyakarta: Ombak, 2016) hlm. 5.

Karena musyawarah (*kombongari*) merupakan jiwa masyarakat Toraja.²⁹ Dikatakan sebagai jiwa, karena bermusyawarah (*ma'kombongari*) sesuai dengan konteks Toraja yang dapat menumbuhkan antusiasme atau semangat dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Dengan melalui musyawarah tersebut, maka akan terbentuk kepemimpinan-kepemimpinan dalam masyarakat. Kepemimpinan mesti dilakukan secara bersama-sama dan bukan berjalan sendiri-sendiri.

Dengan mendalami adat-budaya orang Toraja, maka akan nampak karakternya yang khas, secara khusus ketika ada kegiatan-kegiatan atau keramaian, seperti *rambu tuka'* (pesta perkawinan) dan *rambu solo'* (upacara kematian). Mengapa orang Toraja pada saat-saat tertentu, terlebih khusus ketika berkumpul-kumpul ketika melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan atau pekerjaan, kadang-kadang memunculkan suara yang di sebut *meoli* (bersuara keras dengan cara yang khas)? Karena orang Toraja sangat mudah tergerak secara emosional. Apalagi ketika berkumpul-kumpul dalam suatu kegiatan. Karena secara emosional orang Toraja sangat mudah tergerak, maka dari itu, tidaklah berlebihan jika ada asumsi yang menyatakan bahwa orang Toraja sangat mudah terprovokasi. Untuk itulah, dalam memimpin orang Toraja, memang mesti piawai dalam melibatkan atau mengelola emosi dan mengarahkannya ke hal-hal yang sifatnya lebih positif. Kepiawaian dalam mengelola emosi akan mempererat tali persekutuan, persatuan, kerja sama dan saling menghormati dalam membangun relasi.

Ketika memandang *tongkonan* (rumah) dan *alang* (lumbung) maka akan nampak *passura'* (ukiran-ukiran) yang mengelilinginya. Ukiran-ukiran tersebut sarat dengan makna

²⁹Andarias Kabanga'. *Musyawarah Akbar Untulak Buntunna Bone Abad ke-17 di Wilayah Toraja*, (Laporan Hasil Penelitian: STAK.N Toraja, 2014) hlm. 56.

atau nilai-nilai luhur yang memancarkan kepemimpinan dalam menata kehidupan yang sejahtera, harmoni dan stabil. Sebut saja beberapa nilai luhur masyarakat Toraja yang sangat arif dan bijaksana yang tergambarkan melalui *passura* ' atau ukiran yang terdapat pada *tongkonan* dan *alang* diantaranya, yaitu:³⁰

1. *Pa' bua kapa* ', artinya hidup dengan suci,
2. *Pa' barra '-barra* ', artinya hidup dengan kejujuran,
3. *Pa' re 'po ' sangbua*, artinya hidup dalam kebersamaan,
4. *Limbongan*, artinya mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan pribadi (altruis).
5. *Pa ' Itikku pare*, artinya kerendahan hati.
6. *Pa' tanduk pampang*, artinya menekankan kepemimpinan yang berbaur atau berjalan bersama-sama dengan yang dipimpinya, yang di pimpin biasanya disebut *Solana*, sehingga baik pemimpin maupun yang dipimpin memiliki tingkat yang sama.³¹
7. *Passekong kandaure*, artinya masyarakat didasarkan pada gerak kebersamaan dan keserasian dalam perbedaan. " Berbeda-beda tapi tetap satu (Bhineka Tunggal Ika)

Tentu nilai-nilai luhur manusia Toraja yang tergambarkan dalam *passura* ' *Toraya* atau ukiran Toraja yang terdapat pada *tongkonan* maupun *alang* masih banyak, namun cukuplah 7 (tujuh) untuk menggambarkan bagaimana seharusnya orang Toraja membangun kehidupan dalam masyarakat yang diwarnai dengan kesejahteraan, keharmonisan dan kestabilan. Dalam buku *Toraya Ma'kombongan* (Toraja Bermusyawah) nilai-nilai tertinggi itu adalah persaudaraan, solidaritas, kekeluargaan, persekutuan, kesatuan dan harmoni yang

³⁰Yans Sulo Panganna'. *Bisikan Suci Passura ' Toraya* (Jawa Tengah: Nugra Media, 2018), hhn. 13.

³¹ *Ibid*, 296-297.

³¹ *Ibid*, 331-332.

dikategorikan dalam tiga harmoni, yakni: harmoni dengan Tuhan (iman, ketaatan dan kemuliaan), harmoni dengan sesama (cinta, keadilan, tanggung jawab, *kasianggaran* dan *kasiangkarari*) dan harmoni dengan alam (penjagaan alam dan pelestarian).³³ Dengan memahami secara mendalam nilai-nilai yang mempersatukan masyarakat Toraja, maka akan memudahkan untuk mengelola emosi orang-orang yang dipimpin untuk di arahkan ke hal-hal yang sifatnya lebih positif serta akan memudahkan untuk mengembangkan atau menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang baik dan benar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Telah diketahui bahwa orang Toraja cepat tergerak secara emosional dan cenderung mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan umum dan memiliki semangat gotong royong karena di dasari pada nilai *kasianggaran* (saling menghormati) dan *kasiangkarari* (saling tolong-menolong). Karena itu, kepemimpinan dalam mengatasi penyakit sosial yang disertai dengan musyawarah (*kombongari*) serta dilakukan secara bersama-sama atau kolektif oleh Tokoh Adat, Pemerintah, dan Tokoh Agama (Gereja), maka pasti masyarakat Toraja akan mentaatinya.

F. Penyakit Sosial dalam Masyarakat Toraja

Penyakit sosial didefenisikan sebagai tindakan atau peristiwa yang melanggar prinsip-prinsip kebenaran, sehingga menimbulkan keresahan, ketidak tentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, mesti di atasi dan di basmi supaya tidak berkembang dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat yang pada gilirannya merusak tatanan

ⁱⁱ*Toraya Ma'kombongan*; "Sangtiangkaran pakalebu pa'inaan umbangun sangtorayan lan lili'na Indunesis". *Refleksi 100 Tahun Injil Masuk Toraja (1913-2013) dan Proyeksi Toraja 100 Tahun ke Depan (2013-2113) Era Pembaruan dan Transformasi*. (Yogyakarta: Gunung Sopai, 2013), hlm. 45.

kehidupan. Disebut melanggar prinsip kebenaran, karena melenceng dari hukum yang berlaku, norma-norma agama dan nilai-nilai warisan kearifan lokal dalam masyarakat.

Globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan era informasi yang semakin membanjiri kehidupan warga masyarakat tidak hanya menimbulkan kesan yang menguntungkan tetapi juga memunculkan berbagai problematika yang membutuhkan perhatian dan menguras pikiran untuk mengatasinya. Revolusi dalam kehidupan sosial dan kebudayaan menantang para pemimpin-pemimpin untuk peka dalam menghadapi arus perubahan yang begitu cepat. Di tengah-tengah kekaguman terhadap perkembangan zaman yang semakin canggih telah semakin membuat kehidupan warga masyarakat terlena sehingga seakan-akan lupa akan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Kehidupan warga masyarakat semakin mengarah pada suasana hedonisme dan individualistik. Kejahatan berevolusi, mengambil cara-cara yang halus, memakai topeng sehingga sulit untuk dikenali mengakibatkan pembaharuan psikis seseorang ke arah yang kurang baik, mengakibatkan kemerosotan moral yang tidak terkendali. Orang-orang yang kurang bijaksana dalam menanggapi kemajuan teknologi yang semakin canggih dan penyebaran arus informasi yang tidak terkendali telah merongrong sendi-sendi kehidupan individu-individu yang terjebak dalam lingkaran-lingkaran kejahatan yang sengaja dirancang oleh oknum-oknum tertentu untuk meluncurkan aksinya dalam mempengaruhi kehidupan. Menyebarnya karakter-karakter yang tidak baik dan tidak bijaksana dan berbagai tindakan-tindakan yang tidak etis sangat mewarnai kehidupan sosial bahkan meresahkan kehidupan warga masyarakat. Sehingga hal-hal tersebut tidak lagi tersembunyi bahkan secara kasat mata sering di jumpai dalam kehidupan masyarakat. Apakah ini, karena perkembangan dan kemajuan zaman, atautkah karena kita mengalami krisis kepemimpinan? Tentu ini merupakan

pertanyaan yang membutuhkan pergumulan secara mendalam dan komitmen besar untuk menangani problem tersebut.

Penyalahgunaan gunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme, kemunafikan, penggunaan narkoba, perselingkuhan dan lain-lain yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran merupakan contoh cacat moral diantara pemangku-pemangku kedudukan yang penting dalam masyarakat. Sehingga menjadi contoh yang buruk, yang merusak prinsip-prinsip kehidupan yang wajar. Tentu harapan masyarakat bahwa pemimpin-pemimpin yang muncul tidak memiliki karakter-karakter demikian. Karena masyarakat membutuhkan pemimpin-pemimpin yang dapat menjalankan peran kepemimpinannya dengan baik dan benar. Secara khusus, pemimpin-pemimpin yang dapat berperan dalam mengatasi penyakit sosial dalam masyarakat.

Penyakit sosial, apabila tidak di atasi dengan cermat, maka akan mempengaruhi dan merusak tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan dan pada giliran selanjutnya memunculkan ketidakharmonisan dan ketidaksejahteraan karena berujung atau berdampak pada kemiskinan, baik kemiskinan secara materi, kemiskinan intelektual, kemiskinan moral dan kemiskinan spiritual.

Penyakit sosial yang akan dibahas dan mendapat perhatian khusus pada bagian ini, akan di uraikan di bawah ini, diantaranya, yaitu:

Judi Adu Kerbau dan Judi Sabung Ayam

Judi adalah suatu permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan dimana hanya ada dua kemungkinan yakni menang atau kalah. Maraknya perjudian di dalam masyarakat yang tidak hanya ada pada kalangan orang tua, tetapi juga pada kalangan pemuda baik yang masih

sekolah maupun yang sudah tidak sekolah telah mengakibatkan mereka yang terlibat dalam perjudian malas untuk bekerja keras, melainkan memilih jalan instan untuk memperoleh sesuatu yang tidak pasti. Di Indonesia, judi itu dilarang baik dari sudut pandang hukum maupun dari sudut pandang agama. Judi jelas-jelas tidak mendidik bahkan merusak moral bangsa dan mengurangi etos kerja bagi mereka yang kecanduan main judi. Judi yang akan dibahas disini adalah judi adu kerbau dan judi sabung ayam sebagaimana yang sering dijumpai dalam konteks kehidupan masyarakat Toraja.

“Budaya *bulangan londong* dan *ma'pasilaga tedong*, mumi merupakan ritus *rambu solo*’ untuk strata tertentu dalam masyarakat Toraja, sebagai bentuk penghormatan kepada si-mati tanpa ada muatan judi (taruhan uang)”.^{34 3}

Versi lain tentang pengaduan ayam (*silondongari*) atau bisa dikatakan penyelesaian persolan dalam masyarakat Toraja (pengadilan) dengan mengadu dua ekor ayam, bagi pihak yang ayamnya dikalahkan dinyatakan kalah dalam pengadilan tradisional Toraja tersebut?⁵ Dengan demikian, baik adu kerbau, maupun sabung ayam pada hakikatnya merupakan bagian dari adat-kebudayaan masyarakat Toraja tetapi di dalamnya tidak mengandung unsur judi.

Judi datang diperkenalkan ke Toraja atau dengan kata lain dibawah dari luar masuk ke Toraja sejak perdagangan kopi secara historis mulai berlangsung di Toraja. Sejarah sosial Tana Toraja yang di tulis oleh Terance W. Bigalke menyatakan bahwa ketika judi eksis di Toraja seringkali taruhannya adalah para budak apabila tidak lagi mampu membayar hutang

³⁴Lih. *Himpunan Keputusan Sidang Sinode Am XX/K Gereja Toraja* (Makale: Panitia SSA XXIV GT, 5), hlm. 206.

³⁵Lih. *Terjemahan Memory Van Overgave Controlier Tanah Toraja 1946-147*. hlm. 140.

yang dilakukan oleh majikannya.³⁶ Dengan demikian, judi yang datang dibawah dari luar Toraja tersebut dapat dipastikan dipergunakan untuk mempengaruhi kehidupan di Toraja dan supaya secara historis orang-orang yang lemah di Toraja lebih mudah di dapatkan untuk di ikat dan dibawah keluar Toraja untuk dijadikan budak. Karena itu, judi adalah suatu tindakan pembodohan dan menghasilkan perilaku-perilaku yang tidak etis.

Dewasa ini aktivitas judi dalam lingkungan masyarakat Toraja sudah meraja lelah dan mempengaruhi kehidupan banyak pemuda, baik pemuda yang masih sekolah maupun pemuda yang sudah tidak sekolah. Judi merupakan pelanggaran hukum dan sekaligus juga melanggar norma-norma agama dan juga tidak di kenal dalam adat asli Toraja sekalipun judi sudah mulai di kenal di Toraja sebelum Injil di bawah masuk ke Toraja. Untuk itu, penting di tangani supaya tidak merusak generasi penerus bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara khusus generasi muda Toraja.

Orang yang terjun ke dunia judi, niscaya akan bernafsu untuk terus bermain judi. Sehingga apapun yang dimiliki akan di jual atau di uangkan untuk dipakai berjudi. Bagi mereka yang sudah berkeluarga, tetapi terjun ke dunia judi pasti akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga. Bagi mereka yang masih sekolah tetapi sudah mencoba-coba tentang judi, niscaya akan mengganggu semangat belajarnya. Banyak dampak-dampak lain yang merugikan dari judi, sehingga masyarakat harus di edukasi mengenai bahaya perjudian.

³⁶Terance W. Bigalke. *Sejarah Sosial Tana Toraja*, (Yogyakarta: Ombak, 2016) hlm. 34.

Money Politik (Membeli Suara Rakyat Dengan Uang)

Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, politik dipahami sebagai suatu kekuasaan menduduki parlemen atau pemerintahan sehingga politik dapat di indentikkan dengan kekuasaan atau kedudukan/⁷ Untuk memperoleh kekuasaan atau kedudukan dalam parlemen atau pemerintahan, maka di butuhkan partai politik sebagai sarana untuk berkontestasi dalam perpolitikan supaya di dalam parlemen atau pemerintahan ada wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Karena tujuan pokok dibentuknya partai politik adalah untuk mensejahterakan rakyat (lih. UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, pasal 10). Tujuan tersebut sejalan dengan pandangan Thomas Aquinas bahwa tujuan dari politik adalah *Bonum Commune* yang artinya kebaikan bersama. Kebaikan bersama adalah sasaran akhir (*goal*) dalam politik atau negara. Dengan demikian, para pemimpin (politik) harus mampu menyatukan setiap tujuan individu-individu yang berbeda-beda menjadi satu tujuan yang sifatnya umum dan menjamin keadilan sosial dalam kehidupan warga masyarakat/⁹ Namun ironisnya tujuan baik dari politik tersebut seringkali tidak sejalan dengan realitas. Kenyataan tersebut terjadi karena oknum-oknum tertentu menyimpang dari politik yang wajar menjadi politik yang tidak wajar. Mengapa? Karena *money politic* (politik uang). *Money politic* tersebut sering terjadi dalam masyarakat secara khusus di Toraja ketika menjelang kontestasi politik.

Dalam buku yang bertajuk *Toraja Melawan Politik Uang*, dimana buku tersebut merupakan sumbangsih pemikiran dari beberapa kalangan yang memiliki latar belakang

³⁷Gunche Lugo. *Manifesto Politik Yesus: "Yesus tidak berpolitik Praktis, tapi Yesus berpolitik etik"*, (Yogyakarta: ANDJ, 2009), hlm. 42.

³⁸*ibid*, 9.

³⁹Simplesius Sandur. *Filsafat Politik & Hukum THOMAS AQUINAS*, (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hlm.

profesi yang berbeda-beda untuk menyikapi *money politic* yang marak terjadi di Toraja. Namun dalam buku tersebut, secara khusus tulisan Kristian H.P. Lambe yang berjudul *Strukturasi Politik Uang di Toraja* perlu untuk di soroti. Tulisan tersebut menyoroti politik uang di Toraja dengan menggunakan pendekatan teori strukturasi Anthony Giddens. Kesimpulannya adalah bahwa aktor politik dan struktur merupakan dualitas dan bukan dualisme. Sehingga aktor politik mempunyai peran untuk mentransformasi struktur yang tidak adil serta menindas. Aktor bisa saja melakukan perlawanan terhadap struktur, karena dalam kacamata teori strukturasi menurut Anthony Giddens bahwa struktur yang berlaku tidaklah sepenuhnya bersifat pemaksaan secara total. Jika di hubungkan dengan *money politic*, maka kesimpulannya adalah bahwa uang menentukan kelancaran aktivitas politik, tanpa uang maka politik tidak akan jalan. Sehingga uang tidak terpisahkan dari politik, melainkan dualitas atau bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Politisi menyadari bahwa *money politic* dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dengan strategi politik dalam mempertahankan dukungan untuk menempati kekuasaan (*inctimbeni*) atau merebut dukungan atau kekuasaan mereka terpaksa menerobos struktur demi mencapai tujuan politiknya. Sederhananya bahwa kandidat yang melakukan *money politic* merupakan bentuk dualitas agen dan struktur. Artinya agen/aktor politik bisa mempengaruhi struktur atau mentransformasi struktur sekaligus juga struktur bisa mempengaruhi agen/aktor politik. Dengan demikian, kandidat yang berkontestasi dalam memperebutkan kekuasaan cenderung melakukan praktik *money politic* sebagai bentuk upaya, strategi atau taktik dalam mencapai tujuan politiknya (perlawanan terhadap struktur yang berlaku). Praktik tersebut di dukung oleh keadaan masyarakat yang sifatnya cenderung pragmatisme serta kebanyakan masyarakat yang belum mengetahui pilihannya. Supaya

menghindari golput maka praktik *money politic* kelihatannya akan memotivasi masyarakat ke TPS untuk tetap memberikan suaranya atau pilihannya/⁰ Menarik, namun justru dengan melihat ke dalam masyarakat Toraja yang cenderung mengharap apa yang di istilahkan “*serangan fajar*” atau dengan kata lain *money politic* ketika menjelang kontestasi politik mengindikasikan bahwa masyarakat Toraja skeptis terhadap politik dan dampak dari adanya *money politic* yang dipersoalkan. Memang kampanye politik membutuhkan biaya/dana politik (uang) tetapi setidaknya biaya/dana kampanye mesti di kurangi supaya kampanye tidak mahal termasuk dengan melawan *money politic* supaya harapan politik dalam memperbaiki keadaan menjadi lebih baik dapat terwujud dan masyarakat tidak lagi skeptis dalam menyikapi politik. Dalam konteks *money politic*, struktur sesungguhnya tidak menindas agen/aktor politik, tetapi membentuk perilaku agen/aktor politik, tetapi pada faktanya agen/aktor politik yang melakukan *money politic* justru yang menindas struktur, karena menerobos struktur.

Tulisan Pdt. Markus Lingga yang bertajuk *Politik Uang dan Iman Kristen*, menyatakan ada empat penyebab sulitnya politik uang hilang di Indonesia, yaitu: Alasan ekonomi, alasan politik, alasan hukum dan alasan budaya. Secara khusus alasan hukum yang mengatur tentang politik di anggap masih lemah karena sanksi hanya dijatuhkan kepada pemberi uang tetapi penerima bebas dari hukuman.⁴¹ Memang benar, tetapi penting untuk di pertimbangkan bahwa, apabila sanksi juga akan di jatuhkan kepada penerima uang maka kemungkinan besar akan menambah kesulitan untuk mendeteksi adanya politik uang dalam masyarakat.

Mengapa? Kemungkinan penerima akan diam dan tidak akan berani membahas mengenai

⁰Bert Tallulembang & Yekhonya F.T. Timbang. *Toraja Melawan Politik Uang*, (Yogyakarta: Gunung Sopai, 2020) hlm. 141-146.
jbid, 42-48.

politik uang dalam masyarakat karena adanya sanksi itu. Justru dari masyarakat penerima politik uang yang memberikan informasi tentang adanya transaksi jual-beli suara yang diberikan oleh kandidat. Dalam kondisi tersebut, akan memungkinkan politik uang akan merasa aman. Karena isu-isu politik uang dalam masyarakat tidak akan nampak. Karena baik pemberi uang maupun penerima uang sama-sama akan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli suara.

Money politic yang sering terjadi di Toraja menandakan bahwa masyarakat Toraja mengalami krisis politik. Upaya dalam memperebutkan kekuasaan baik pada tingkat bupati, DPRD, bahkan sampai pada tingkat pemilihan kepala lembang dengan cara membeli suara rakyat dengan uang merupakan bibit-bibit lahirnya pemimpin-pemimpin transaksional dan tidak transparan. Sehingga pada gilirannya berujung pada korupsi, kolusi dan nepotisme. Jika uang yang menentukan terpilihnya kader-kader partai politik dalam menempati posisi dalam lembaga pemerintahan atau parlemen sebagai wakil-wakil rakyat menandakan bangsa dan negara kita dikuasai oleh kaum-kaum kapitalis. Apabila yang ada dibalik layar kader-kader parpol adalah mereka yang memiliki modal besar, maka sudah pasti ada agenda-agenda tertentu yang di incar oleh pemilik modal. Dengan demikian, kader-kader parpol yang terpilih tidak akan lagi mementingkan kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan yang ada di balik layar dan kepentingan pribadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gunche Lugo dibawah ini:

“Sesungguhnya untuk menjadi anggota dewan diperlukan dana miliaran rupiah. Mungkin mereka terjerat utang ketika mencalonkan diri menjadi anggota DPR atau tuntutan setoran partai politik. Mereka tidak lagi memikirkan kejujuran atau perbuatan yang luhur. Kesempatan ada di depan

mata dan inereka memiliki kewenangan untuk memutuskan, sehingga tindakan korupsi bukan lagi sebagai sesuatu yang memalukan, tetapi cenderung didiamkan”.⁴²

Money politic yang masih terjadi secara khusus di dalam lingkungan masyarakat Toraja yang telah lama dibicarakan bahkan di kecam namun tidak kunjung berhenti dan masih terus saja terjadi apabila menjelang pemilihan bupati, pemilihan DPRJD dan pemilihan kepala lembang menandakan bahwa *money politic* seakan-akan membudaya dalam masyarakat Toraja sehingga sulit untuk dihilangkan. *Money politic* yang masih eksis dalam masyarakat sesungguhnya menandakan bahwa masyarakat skeptis atau melihat pemilu atau pilkada hanya sebagai bentuk ritual sosial. Bukannya melihat pemilu atau pilkada itu sebagai momen politik yang penting untuk memperjuangkan cita-cita yang luhur.⁴³ Politik yang bermartabat adalah politik yang seharusnya tidak dipermainkan oleh uang ketika menjelang pemilihan calon-calon yang akan menduduki pemerintahan atau parlemen mulai dari tingkat yang paling atas sampai ke tingkat yang paling bawah atau tingkat kades.⁴⁴ Disadari atau tidak *money politic* merupakan jalan pintas yang tidak bermartabat dalam merauk suara. Hal itu, nampak dalam masyarakat yang tidak kritis terhadap *money politic* ketika menjelang kontestasi politik dan tidak berniat untuk mempelajari visi-misi serta *track record* dan kompetensi para kandidat atau calon-calon yang akan menduduki parlemen atau pemerintahan sebagai wakil-wakil rakyat. Ironisnya sebagian masyarakat seakan-akan menganggap *money politic* sebagai sebuah kebutuhan pada saat menjelang kontestasi politik.

⁴²Gunche Lugo. *Manifesto Politik Yesus: "Yesus tidak berpolitik Praktis, tapi Yesus berpolitik etik"*, (Yogyakarta: AND1, 2009). hlm. 6-7.

⁴³Haryatmoko. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan politisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 167.

⁴⁴Max Reeus. *Republik Sialan: Memburu Kejernihan di Tengah Belantara Kerancuan*, (Semarang: Ledalero, 2003), hlm. 80.

Penyalagunaan Napza

Narkotika, psikotropika serta zat adiktif yang berbahaya, jika dikonsumsi oleh manusia dengan cara diminum, dihirup, maupun disuntikkan akan mengubah psikologis seseorang serta menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Napza yang disalahgunakan merusak karakter-karakter-karakler pemakainya. Menyebarinya penyalahgunaan napza mulai dari perkotaan sampai ke desa merupakan ancaman yang berbahaya bagi masyarakat secara khusus bagi generasi muda. Memang negara telah berupaya untuk menindak tegas bandar napza serta mengupayakan mengidentifikasi jaringan atau penyebarannya, namun seakan-akan penyebarluasan napza sulit untuk diberantas sampai ke akar-akarnya. Di Indonesia sampai sekarang ini sering teridentifikasi baik pemakai maupun penyalur napza menandakan bahwa penyaluran dan pemakaian napza masih eksis di dalam masyarakat baik pada tingkat perkotaan maupun hingga ke pelosok-pelosok tanah air. Termasuk Toraja juga di serang oleh pendistribusian dan pemakaian napza. Jika problem sosial tersebut tidak dapat diberantas hingga ke akar-akarnya, maka generasi penerus bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam bahaya krisis moral.

Dampak penggunaan napza serta berbahaya untuk psikis dan kesehatan yang di timbulkan bagi pemakainya, yaitu:⁴⁵

Penggunaan napza, akan berdampak:

1. Kemungkinan akan sering menimbulkan halusinasi bagi pemakainya

⁴⁵Rannu Sanderan. *Bergaul dalam Jerat Narkoba: Masalah Pecandtt Narkoba di Toraja Utara*, (Laporan Hasil Penelitian: STAKN Toraja, 2014), hlm. 12-13.

2. Membuat pemakainya merasa senang dan tenang, karena itulah, orang-orang tertentu yang sering mengalami stress, tanpa berpikir panjang mengambil keputusan untuk mencoba-coba tentang narkoba.
3. Dapat membuat pemakainya tertidur tanpa merasakan gangguan.
4. Menimbulkan ketergantungan atau kecanduan bagi mereka yang mengkonsumsi napza

Penggunaan napza, akan berbahaya untuk psikis dan kesehatan, yaitu:

1. Pemakainya akan cenderung pemaarah dan mudah untuk melakukan kekerasan.
2. Menurunkan daya ingat bagi pemakainya.
3. Pemakainya akan cenderung apatis.
4. Cenderung melakukan seks.
5. Apabila napza sudah tidak di miliki atau lambad di konsumsi, maka pemakainya akan cenderung menyiksa dirinya.
6. Timbulnya berbagai penyakit bagi pemakainya, seperti: penyakit radang hati, ginjal, paru-paru dan pembuluh darah. Serta apabila napza sudah berlebihan di gunakan oleh pemakainya, maka akan berujung pada kematian.

Jadi, penyalagunaan napza dapat berdampak buruk pada kondisi kejiwaan atau psikologi serta kesehatan orang-orang yang mengkonsumsi napza. Seseorang yang sebelumnya tidak mengkonsumsi napza, tetapi dalam pergaulannya mulai mencoba-coba untuk mengkonsumsi napza, maka efeknya atau dampaknya akan mengubah pola pikiran, perilaku dan perasaan. Berdasarkan dampak dan bahaya penyalagunaan napza yang telah disebutkan di atas, maka dapat dipastikan, seseorang yang mengkonsumsi napza akan berbahaya dalam kehidupan

sosial kemasyarakatan. Karena itulah, korban penyalagunaan napza harus direhabilitasi dan masyarakat mesti di pantau dengan cermat dari bahaya pengaruh penyalagunaan napza.

G. Kepemimpinan dalam Mengatasi Penyakit Sosial

Calvin berpendapat bahwa seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa maka sistem penguasa negara tidak perlu ada bahkan tidak akan ada. Karena yang akan ada adalah pemerintahan Allah (teokrasi). Tuhan Allah yang akan langsung menjalankan pemerintahannya atas umat manusia. Tetapi karena dosa mengakibatkan hubungan Tuhan Allah dengan manusia menjadi rusak. Rusaknya hubungan atau relasi antara Tuhan Allah dengan umat manusia mengakibatkan manusia mesti mengupayakan sendiri kehidupannya secara mandiri. Dosa telah menimbulkan atau melahirkan berbagai macam kejahatan, ketidakbenaran, penyimpangan, ketidakadilan, serta kehancuran mewarnai kehidupan manusia. Dalam suasana demikian manusia membutuhkan perlindungan. Manusia mencari perlindungan karena takut akan ancaman-ancaman di sekitar kehidupannya dan ancaman tersebut bisa timbul dari mana saja, baik dari alam, hewan buas, maupun sesama manusia sendiri yang dipandang sebagai ancaman yang paling berbahaya. Dalam kondisi demikian Thomas Hobbes menyebut manusia sebagai *homo homini lupus* yang artinya manusia serigala bagi sesamanya. Maka dari itu, dibutuhkan suatu negara yang memiliki kekuasaan yang besar untuk mengendalikan tingkah laku manusia yang berpotensi mengancam kehidupan sesamanya. Namun menurut perjalanan sejarah umat manusia, negara tetap tidak mampu menjamin keselamatan umat manusia dari setiap ancaman di sekitarnya. Keadaan demikian, diakibatkan karena manusia sudah jatuh kedalam dosa. Dalam keadaan “khaos” dan kepiluan kehidupan umat manusia di muka bumi akibat dari dosa yang mereka perbuat, Tuhan Allah tetap mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia yang

kacau. Tuhan Allah mengirim Anak-Nya yang tunggal (Raja Damai) untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari perbudakan dosa. Dalam pandangan Calvin, disebut sebagai *spiritual Government* atau pemerintahan rohani yang berfokus pada Kristus. Kristus telah memerdekakan manusia dari perbudakan dosa.⁴⁶ Untuk melanjutkan misi Kristus, manusia sebagai kreator atau kawan sekerja Tuhan Allah dalam dunia mempunyai peran penting untuk membawa *shalom* dalam dunia yang diwarnai dengan ketidakpastian dan berbagai kebobrokan moral dan pergumulannya.

Kepemimpinan muncul karena sarat dengan kepentingan-kepentingan bersama dan karena ada problem masyarakat yang ingin diselesaikan. Di situ ada sesuatu yang ingin diperjuangkan atau dimanifestasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh Tokoh Alkitabiah yang memunculkan kepemimpinan ketika genap tujuh puluh tahun umat Yahudi berada dalam pembuangan, yaitu:⁴⁷

- I. Zerubabel: Pemimpin yang bertindak untuk membangun kembali Bait Allah yang dihancurkan pada saat kerajaan Babel melancarkan serangan di bawah pemerintahan Nebukadnezar.
2. Ezra: Pemimpin yang bertindak untuk membangun kerohanian dan memulihkan penyembahan.
3. Nehemia: Pemimpin yang mengambil inisiatif untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang juga turut dihancurkan.

⁴⁶Gunche Lugo. *Manifesto Politik Yesus: "Yesus tidak berpolitik Praktis, tapi Yesus berpolitik etik"*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), hlm. 45-46 dan 80.

⁴⁷Daniel Ronda. *Leadership Wisdom: Antologi Hikmat Kepemimpinan*. (Bandung: Kalam Hidup, 2011) hlm. 21.

Ketiga tokoh di atas di munculkan untuk memberikan gambaran, mengenai bagaimana seharusnya pemimpin menjalankan fungsi kepemimpinannya. Pemimpin tampil di dalam masyarakat karena memiliki analisis-analisis yang mendalam tentang problem-problem yang terjadi dalam masyarakat. Untuk menilai pemimpin, maka itu bisa di uji ketika memunculkan ke permukaan persoalan kemasyarakatan yang akan di kerjakan atau yang telah berhasil diselesaikan. Pemimpin itu, harus mampu menemukan solusi yang tepat untuk membangun situasi atau kondisi kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih baik. Untuk itu, pemimpin di tantang untuk mampu menangkap sebuah visi yang jauh ke depan, yang mampu membangkitkan hasrat.

Dalam menjalankan proses kepemimpinan tidak terlepas dari visi-misi. Visi-misi mengarahkan pemimpin untuk melihat jauh kedepan yakni, apa yang akan terjadi atau sesuatu yang ingin dicapai dan apa yang mesti dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Visi adalah rencana kegiatan, sasaran dan tujuan, yang dapat di capai dalam kehidupan ini.⁴⁸ Dalam menggambarkan sebuah visi, Eddie Gibbs mengutip pandangan Charles Swindoll bahwa visi yang autentik, yakni *"Visi di timbulkan oleh iman, di topang oleh pengharapan, dipercikkan oleh imajinasi dan diperkuat oleh antusiasme"*.⁴⁹ Dalam kitab Ibrani 11:1, tertulis bahwa *"Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat"*. Dengan demikian visi muncul dari iman yang membangkitkan semangat berpengharapan. Ketiga tokoh alkitabiah yang telah dimunculkan di atas sebagai acuan tentang bagaimana menangkap visi yang membangun dalam

⁴⁸Charles Agyin-Asare. *Dari Orang Biasa Menjadi Luar Biasa: Melangkah dengan Visi untuk Meraih Sukses Sejati: Bagaimana Menangkap Visi, Cara Membuat Perencanaan, Menetapkan IVaktu untuk Bertindak*, (Yogyakarta: ANDI, 2008), hlm. 8.

⁴⁹Eddie Gibbs. *Kepemimpinan Gereja Masa Mendatang: Membentuk dan Memperbaharui Kepemimpinan yang Mampu Bertahan dalam Zaman yang Berubah*. (Jakarta: Gunung Mulia, 2010) hlm 169.

masyarakat. Pemimpin yang kompeten akan berusaha untuk menjadikan visinya dijiwai oleh masyarakat. Sehingga dengan visi itu, akan membangkitkan kepercayaan, pengharapan dan semangat dalam kehidupan masyarakat, kehidupan berpengharapan itulah yang seharusnya ditanamkan oleh pemimpin dalam kehidupan masyarakat yang cenderung apatis terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat.

Tugas pemimpin memang sangat berat tetapi juga mulia, karena pemimpin bertindak untuk mendisiplinkan kehidupan warga masyarakat, membimbing cara hidup warga masyarakat ke jalan yang benar, memprakarsai pembaharuan dengan tujuan kemajuan taraf hidup warga masyarakat dan memikul tanggung jawab yang kompleks dalam masyarakat?⁰ Berdasarkan fungsi dan perannya, pemimpin harus memiliki mental yang tangguh. Karena pada faktanya seringkali pemimpin menuai reaksi perlawanan dari warga masyarakat yang sulit untuk keluar dari kebiasaan untuk dibimbing kearah pembaharuan yang lebih baik. Dalam situasi tersebut pemimpin harus bersiap dibenci, dimusuhi atau di tolak oleh orang-orang yang hedonistik dan yang sulit untuk memperbaiki kelakuan kehidupannya. Memang kadangkala pemimpin akan berada pada titik yang tidak membahagiakan dirinya demi untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik dan benar. Mereka akan menuai kritik yang tajam dari orang-orang yang sifatnya individualistik dan hedonistik. Pemimpin-pemimpin yang ideal akan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang sulit.

Poli menyampaikan bahwa, sebagaimana yang di katakana Einstein bahwa sesungguhnya setiap masalah yang terjadi pada hari ini, itu disebabkan oleh cara-cara masa lalu dalam menanggapi setiap masalah yang ada, karenanya cara-cara masa lalu tidak lagi dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah hari ini yang sesungguhnya merupakan

⁵⁰J. Oswald Sanders. *Kepemimpinan Rohani*, (Bandung: Kalam Hidup, 1979) hlm. 126-129.

ketidacermatan penyelesaian masalah yang terjadi pada masa lalu. Untuk itu, diperlukan manajemen perubahan. Karena setiap masalah itu, di akibatkan oleh suatu sistem. Maka dari itu, pendekatannya adalah pendekatan sistemik?¹ Haryatmoko menulis suatu ungkapan dalam bukunya yang bertajuk, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, yakni sesungguhnya “sistem membusukkan politisi yang jujur”.^{51 52} Hal tersebut dikatakan, karena dibalik layar politisi yang terlibat dalam penggalangan dana kampanye menuntut loyalitas kepada partai sehingga politisi yang awalnya ingin memperjuangkan perbaikan nazib masyarakat dan pembangunan menjadi tidak berdaya ketika diperhadapkan dengan tuntutan-tuntutan yang terlibat di balik layar. Untuk itu, Haryatmoko mengatakan bahwa semestinya pembatasan dana kampanye dan mekanisme pendanaan mesti di awasi secara ketat. Karena parpol semestinya membangun moralitas politik pada pendirian-pendirian yang etis?³ Supaya tidak terjadi kebijakan-kebijakan yang tidak etis, karena merugikan kepentingan masyarakat.

Kata kunci untuk mengatasi penyakit sosial terletak pada pendekatan sistem dengan menekankan manajemen perubahan. Eddie Gibbs mengutip himbauan dari Johnson bahwa, “Jika anda tidak berubah, anda akan punah”.⁵⁴ Perubahan adalah kata kunci untuk pemimpin yang efektif.⁵⁵ Salah satu yang menjadi tantangan bagi pemimpin adalah kemampuannya untuk merespon perubahan dan menjadi agen perubahan atau memimpin perubahan ke arah

⁵¹W.1.M. Poli. *Kepemimpinan Strategis: Pelajaran dari Yunani Kuno hingga Tana Toraja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2016) hlm. 222.

⁵²Haryatmoko. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan politisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 173.

⁵³Max Regus. *Republik Sialan: Memburu Kejernihan di Tengah Belantara Kerancuan*, (Semarang: Ledalero, 2003), hlm. 78.

⁵⁴Eddie Gibbs. *Kepemimpinan Gereja Masa Mendatang: Membentuk dan Memperbaharui Kepemimpinan yang Mampu Bertahan dalam Zaman yang Berubah*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2010) hlm. 69.

⁵⁵Daniel Ronda. *Leadership IVisdom: Antologi Hikmat Kepemimpinan*, (Bandung: Kalam Hidup, 2011) hlm. 11.

yang lebih baik. Disamping itu, pemimpin juga ditantang untuk berani menderita demi kebenaran. Memperjuangkan kebenaran memang kadangkala menuai konflik. Menghindari kompromi pada ketidakbenaran dan tindakan-tindakan yang tidak bijaksana acapkali menimbulkan situasi yang berbahaya karena di jauhi bahkan dimusuhi. Tindakan menghindari kompromi demi mempertahankan integritas diri inilah yang mungkin paling sulit untuk di tempuh oleh pemimpin-pemimpin kontemporer. Tetapi adalah suatu hal yang sejati apabila pemimpin-pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya berani melawan arus ketidak benaran atau ketidakadilan, bukannya terbawa arus kedalam lingkaran ketidak benaran atau ketidakadilan.

Karena itu, pemimpin-pemimpin yang tampil di dalam masyarakat mesti menjalankan kepemimpinannya untuk menata kehidupan sosial kemasyarakatan agar teratur, tertib, sejahtera, harmoni dan stabil dan harapan tersebut akan terwujud apabila pemimpin-pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya mampu mengatasi penyakit sosial yang rentan mengganggu kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam mengatasi penyakit sosial, tentu tidak terlepas dari penegakan atau pemberlakuan hukum, perintah dan tata tertib.

H. Hubungan Kepemimpinan Tokoh Adat, Pemerintah (Negara/Politik), dan Tokoh Agama (Gereja)

Tidak dapat di sangkal bahwa kekayaan nilai-nilai kebudayaan atau adat yang luhur secara khusus adat-kebudayaan Toraja merupakan anugerah dari Tuhan kepada manusia Toraja. *Tongkonan* sebagai pusat kepemimpinan tradisional masyarakat Toraja memiliki prinsip-prinsip karakteristik yang luhur, karena mengandung nilai-nilai kekeluargaan,

siangkaran, sepenanggungan dalam suatu kehidupan yang harmonis dan stabil.^{56 57} Kita tentu patut bangga dengan nilai-nilai budaya-adat yang ada dalam masyarakat Toraja. Karena dengan nilai-nilai tersebut, mampu menjaga semangat toleransi dan kerukunan umat beragama yang sangat diakui kekuatannya oleh masyarakat luar Toraja, sehingga membuat orang-orang luar datang mempelajari nilai-nilai adat-budaya Toraja. Nilai-nilai tersebut yang perlu dijaga oleh *toparengé*’ atau Tokoh Adat agar tidak terkontaminasi. Seperti misalnya nilai-nilai perjuangan dengan kerja keras yang melalui proses serta etos kerja yang tinggi semestinya terus ditabur oleh *toparengé*’ atau Tokoh Adat di dalam kehidupan masyarakat Toraja supaya tidak hidup budaya instan atau jalan pintas seperti halnya judi adu kerbau dan judi sabung ayam, serta dalam upaya memperoleh kedudukan penting dalam masyarakat seharusnya tidak dilalui dengan jalan pintas melalui *money politic*, tetapi semestinya melalui perjuangan dan kerja keras yang tentunya membutuhkan proses untuk meyakinkan masyarakat tentang visi-misi yang di emban oleh calon/kandidat. *Passura*’ *Toraya* yang sarat dengan makna yang begitu mendalam dan merupakan warisan yang memiliki nilai-nilai yang luhur harus terus di jaga oleh *toparengé*’ atau Tokoh Adat dan terus dipupuk dalam kehidupan masyarakat Toraja. “*Sokko*’-*sokko*’ *napadolo, pampang nrramba solana, dorang ummatai lalan*” merujuk pada sikap gembala atau kepemimpinan yang megarahkan rekan-rekannya?⁷ Jadi, sesungguhnya kepemimpinan yang bersumber dari adat-kebudayaan Toraja dalam hal ini *tongkonan* yang di pegang oleh *toparengé*’ atau Tokoh Adat juga menganut sistem kepemimpinan gembala karena perannya dalam masyarakat sangat vital dalam menjaga nilai-nilai luhur warisan leluhur manusia Toraja serta menyelesaikan sengketa

⁵⁶Bert Tallulembang. *Reinterpretasi <? Reaktualisasi Budaya Toraja*, (Yogyakarta: Gunung Sopai, 2012), hlm. 57.

⁵⁷ Yans Sulo Panganna’. *Bisikan Suci Passura’ Toraya*, (Jawa Tengah: Nugra Media, 2018), hlm. 294.

melalui musyawarah dan memberikan arahan-arahan atau petunjuk dalam upacara adat seperti upacara *rambu solo* ' maupun *upacara rambu luka*

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bahaya bisa muncul, apabila dalam suatu negara politisasi agama tumbuh subur dan berkembang. Karena hal tersebut merupakan ancaman laten yang sewaktu-waktu “meledak” atau mengakibatkan terjadinya kekacauan dalam suatu negara. Jika politisasi agama atau agamanisasi politik tumbuh subur dan berkembang, maka niscaya negara berada dalam ancaman disintegrasi. Untuk itu, mencegah politisasi agama adalah merupakan suatu keharusan dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Politik agama adalah politik moral atau politik kenabian yang bertugas mendidik masyarakat pada nilai-nilai moral, sehingga politik agama bukan politik praktis/partisan. Dan apabila dalam suatu negara terjadi krisis moral atau pemerintah atau pejabat publik yang menyimpang dari jalan kebenaran dan tidak bertanggung jawab atas amanah rakyat, maka disitulah tugas agama-agama untuk membina moral negara dengan menyuarakan suara kenabian. Antara agama dan negara memiliki hubungan yang saling melengkapi. Agama mendidik dan membangun kerohanian masyarakat agar berjalan dalam prinsip-prinsip kebenaran, sedangkan negara memberikan atau menjamin perlindungan hukum dan hak-hak asasi manusia, menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat dan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai untuk mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁹ Negara tidak akan membiarkan diskriminasi, marginalisasi dan rasisme tumbuh dan berkembang dalam kehidupan rakyatnya. Tetapi, apabila hal tersebut terjadi, maka negara mesti bertindak dengan tegas dan adil dengan segala **

⁵⁸Richard M. Daulay. *Amerika VS Irak: Bahaya Politisasi Agama* (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), hlm. 130-131.

TM *Ibid.*, 132-133.

kekuasaan yang dimilikinya, serta disamping itu dibantu oleh agama untuk menyuarakan suara kenabian dalam mendidik tanpa tebang pilih atau tidak pandang bulu. Karena suara kenabian adalah suara kebenaran dan suara keadilan yang sesungguhnya ada dalam tiap-tiap agama. Disamping itu, apabila dalam suatu negara, justru politiknya yang menyimpang atau jauh dari prinsip-prinsip kebenaran, maka agama mesti menyuarakan suara kenabian untuk mendidik sistem politik agar kembali pada prinsip-prinsip kebenaran dan pada tujuan pokok, yakni kebaikan bersama untuk menjamin keharmonisan dan kesejahteraan.

Kitab Roma 13 menyatakan hakekat daripada pemerintah, tetapi tidak dapat disangkal bahwa kadangkala pemerintah menggunakan kekuasaannya dengan lalim dan sewenang-wenang. Karenanya menurut Calvin, umat Kristen mesti mengkritisi dan menentang apabila ada pemerintah-pemerintah yang tidak adil atau jauh dari prinsip-prinsip kebenaran saat menjalankan pemerintahannya atau kepemimpinannya.⁶⁰ Oleh karena itu, dengan pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada rakyat atau masyarakat merupakan suatu hal yang terpuji dan mulia untuk dilakukan oleh elit politik dalam konteks berdemokrasi.⁶¹ Kepemimpinan Gereja (agama) menekankan kerohanian dan berpusat pada keteladanan Yesus Kristus, sedangkan kepemimpinan lembaga pemerintahan (Negara/politik) menekankan pemberlakuan Negara hukum dan menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam relasi saling bekerja sama.⁶² Antara kepemimpinan Gereja (agama) dan kepemimpinan lembaga

⁶⁰Daniel Ronda. *Leadership Wisdom: Antologi Hikmat Kepemimpinan*, (Bandung: Kalam Hidup, 2011) hlm. 121.

⁶¹Gunche Lugo. *Manifesto Politik Yesus: "Yesus tidak berpolitik Praktis, tapi Yesus berpolitik etik"*, (Yogyakarta: AND1, 2009), hlm. 21.

⁶²*Ibid*, 51.

pemerintahan (Negara/politik) tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Karena baik Pemerintah maupun Gereja masing-masing dibawah kedaulatan Allah.⁶³

Di Indonesia dikenal beberapa forum yang terkait dengan Agama, Pemerintah dan Adat, diantara ketiga forum tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama adalah suatu forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dengan tujuan membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama demi kerukunan dan kesejahteraan. FKUB sebagai forum kerja sama memiliki tupoksi diantaranya yaitu:

1. Forum ini dibentuk sebagai wadah bagi para pemimpin-pemimpin agama dalam membicarakan tanggung jawab dan kerja sama di antara warga masyarakat yang menganut agama yang berbeda-beda dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan sebagai bangsa dan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
2. Sebagai wadah bagi pemimpin-pemimpin agama dalam membicarakan kerjasama dengan pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan P4 dan GBHN serta ketentuan lainnya dari pemerintah khususnya yang menyangkut bidang keagamaan.

^{b3}*ibid*, 52.

^M[https://wvx.v.academici.e\(hi/7860179/FKUB_sebagai_Forum_Kerjasama_Antanimat_Beragama](https://wvx.v.academici.e(hi/7860179/FKUB_sebagai_Forum_Kerjasama_Antanimat_Beragama), diakses pada tanggal 10 Maret 2020.

3. Keputusan-keputusan yang diambil oleh wadah musyawarah merupakan kesepakatan yang mempunyai nilai ikatan moral dan bersifat saran atau rekomendasi bagi pemerintah, majelis-majelis agama dan masyarakat.

Forkopimda

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Forum ini diselenggarakan untuk memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur-unsur Forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah. Unsur-unsur dalam Forkopimda tingkat Kabupaten terdiri dari:⁶ⁱ

1. Kepala Daerah (Bupati)
2. DPRD
3. Kapolres
4. Komando Distrik Militer (Dandim)
5. Ketua Pengadilan Agama
6. Ketua Pengadilan Negeri
7. Kepala Kejaksaan Negeri
8. Komando Resort Militer

⁶ⁱ*https://bone.go.id/2019//2/25/forum-koordinasi-pimpinan-daerah-forkopimda/*. di akses pada tanggal 10 Maret 2020.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

AMAN adalah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas masyarakat adat dari berbagai pelosok nusantara. AMAN mempunyai visi untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi semua masyarakat adat di Indonesia.⁶⁶ Secara singkat, AMAN dapat dipahami sebagai suatu organisasi yang memperjuangkan kepentingan masyarakat adat sehingga mempunyai hubungan dengan pemerintah.

Hubungan antara Tokoh Adat, Pemerintah, dan Tokoh Agama (Gereja) adalah saling mengimbangi dan mengontrol. Ketiganya memiliki peran kontrol dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Supaya kebijakan-kebijakan publik dalam negara itu berada pada prinsip-prinsip kebenaran, maka ketiganya berperan sebagai pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai pelayan dan gembala demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat agar stabilitas masyarakat terjamin.

Ketiga forum di atas memberikan gambaran mengenai hubungan antara Agama, Pemerintah dan Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana ketiganya, memiliki peran dalam mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan sosial yang aktual dalam masyarakat. Ketiga wadah atau forum di atas memang memiliki tupoksinya masing-masing, tetapi ketiganya pula dapat saling bekerja sama untuk membangun masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Bekerja sama dalam menjalankan kepemimpinan sebagai pelayan dan gembala dalam masyarakat.

⁶⁶<https://www.v.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Info-sheel-Tenlang-A-MAN-A-4-14122016.pdf>, di akses pada tanggal 10 Maret 2020.

I. Peran Kepemimpinan *Tallu Batu Lalikan* dalam Masyarakat di Toraja Pada Tingkat Kecamatan

Kepemimpinan *Tallu Batu Lalikan* adalah suatu terobosan yang diharapkan dapat menyatukan persepsi antara Tokoh Adat, Pemerintah, dan Tokoh Agama (Gereja). Kegiatan *Toraya Ma'kombongan* (Toraja Bermusyawarah) yang telah di adakan di Tana Toraja pada tanggal 4-6 Juli 2012 mengharapakan mekanisme *Tallu Batu Lalikan* dapat di fungsikan dalam mengambil keputusan secara musyawarah menyangkut pembangunan, kepemimpinan daerah dan berbagai permasalahan di kampung atau wilayah adat.⁶⁷ *Tallu Batu Lalikan* diharapkan dapat saling menopang, bersinergi atau bermitra untuk menyikapi berbagai krisis yang kompleks di Toraja. Mekanisme *Tallu Batu Lalikan* ini mesti di adopsi atau di fungsikan dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan, baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, serta Lembang. Bahkan *Tallu Batu Lalikan* diharapkan dapat duduk bersama untuk mengevaluasi serta menyiapkan calon-calon atau kader-kader yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di Toraja.

Kecamatan merupakan suatu wilayah pemerintahan yang terdiri dari Camat, Lurah, serta Lembang yang dipilih langsung oleh warga setempat dalam kampung. Baik Camat serta Lurah sepagai perangkat Kecamatan, maupun Lembang adalah pemimpin-pemimpin formal dalam masyarakat yang menyelenggarakan pemerintahan di sekitar wilayahnya. Adapun pemimpin-pemimpin informal adalah Tokoh Agama (Gereja) dan Tokoh Adat. Sehingga terobosan yang di bentuk dalam kegiatan *Toraya Ma'kombongan* (Toraja Bermusyawarah) mengharapakan supaya tiga unsur ini, yakni: Tokoh Adat, Pemerintah, dan Tokoh Agama

⁶⁷*Toraya Ma'kombongan, "Sangtiangkaran pakalebu pa'inaan umbangnn sangtorayan lan lili'na Indonesia"*, (Yogyakarta: Gunung Sopai, 2013), hlm. 70.

(Gereja) dapat bermitra untuk membangun dan menyelesaikan persoalan-persoalan di kampung-kampung.

Baik Tokoh Adat, Pemerintah, dan Tokoh Agama (Gereja) memiliki peran penting sebagai pelayan dan gembala dalam masyarakat. Mereka adalah *leader-leader* (pemimpin-pemimpin) yang memiliki peran *leadership* (kepemimpinan) dalam melayani sekaligus membimbing, menuntun dan menjaga keharmonisan serta kesejahteraan kehidupan masyarakat. Supaya keharmonisan dan kesejahteraan dalam masyarakat itu terjaga, maka mesti Tokoh Adat, Pemerintah, dan Tokoh Agama (Gereja) bertindak untuk mengantisipasi (mencegah) dan menangani (penanganan) apabila terjadi hal-hal yang berpotensi merusak keharmonisan dan kesejahteraan dalam masyarakat atau kampung.

Sebagaimana yang telah disajikan pada point B di atas tentang filosofi *Tallu Balu Lalikan*, maka di bawah ini, supaya lebih memudahkan untuk dimengerti, akan di sajikan satu-persatu mengenai gambaran-gambaran umum tentang perannya dalam masyarakat, yaitu:

1.1. Peran Kepemimpinan Tokoh Adat (Adat-Budaya Toraja) dalam Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial yang berbudaya dan memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang masih relevan hingga saat ini untuk konteks kehidupan modernitas dengan perkembangan dan kemajuannya yang menakjubkan. Nilai-nilai kepemimpinan dalam masyarakat adat tidak kalah penting dengan nilai-nilai kepemimpinan dari bentuk yang lain dan yang memahami dengan baik nilai-nilai atau kearifan lokal tersebut adalah Tokoh Adat. Kepemimpinan Tokoh-Tokoh Adat yang akan dipelajari pada bagian ini adalah berdasarkan konteks Adat Toraja.

Dalam kehidupan masyarakat Toraja tradisional memiliki pusat kepemimpinan yang dikenal dengan *tongkonan*. *Tongkonan* merupakan sumber kepemimpinan dalam bidang kemasyarakatan dan keagamaan (*aluk toclolo*). Pemegang kepemimpinan dalam *tongkonan* adalah *toparenge*. *Toparenge* adalah pemimpin ritual pada ritus-ritus *tongkonan*.⁶⁸ Ia bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat. *Tongkonan* merupakan tempat duduk bersama untuk melaksanakan musyawarah. Ada tiga kriteria bagi Tokoh-Tokoh Adat dalam menjalankan kepemimpinannya, yaitu:⁶⁹

1. *Kinaa, manarang*, seorang pemimpin mesti bijaksana dalam menjalankan kepemimpinannya, baik melalui tutur kata, pergaulan maupun pengambilan keputusan. Kriteria tersebut sejalan dengan perspektif Plato yang mengatakan bahwa apabila filsuf yang menjadi pemimpin maka keadilan pasti akan nampak. Karena filsuf akan memimpin dengan kebijaksanaan dan kebaikan yang sesungguhnya. Pemimpin atau seseorang yang mendapatkan kuasa untuk memerintah dan menjalankan pemerintahannya dengan baik dan bijaksana, pasti masyarakat akan mentaatinya.⁷⁰
2. *Sugi*, dimaksudkan bahwa *toparenge* mesti memiliki kekayaan supaya apabila ada anggota masyarakatnya yang kurang mampu, maka *toparenge* harus membantunya.
3. *Barani*, dimaksudkan untuk memiliki keberanian dalam pengambilan keputusan meskipun memiliki konsekuensi atau risiko.

Toparenge (Tokoh Adat) sebagai pemangku adat memiliki tanggung jawab yang penting dalam masyarakat. Sebagai contoh, apabila dalam suatu keluarga atau masyarakat terjadi perselisihan atau pertengkaran maka *toparenge* bertindak sebagai mediator untuk

⁶⁸Theodorus Kobong. *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi. Konlektualisasi, Transformasi*. (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), hlm. 106.

⁶⁹ *Ibid*, 114.

⁷⁰ James Garvey. *20 Karya Filsafat Terbesar*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010) hlm. 9-10.

mendamaikannya sesuai dengan adat dan menentukan hukuman bagi yang bersalah.⁷¹ Atau dengan kata lain jika terdapat persoalan dalam masyarakat itu diselesaikan secara kekeluargaan. Disamping itu, *toparenge* ' bertanggung jawab atas pelaksanaan ritus-ritus *rambu luka* ' maupun *rambu solo* '. *Toparenge* ' sebagai tokoh masyarakat atau penguasa adat biasanya memberi petunjuk dan perintah serta pencerahan kepada masyarakat.⁷² Dengan kata lain, *toparenge* ' menjaga nilai-nilai luhur adat Toraja supaya tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai yang tidak baik yang pada gilirannya akan mengakibatkan ketidak harmonisan dalam masyarakat.

Nilai-nilai kebijaksanaan manusia Toraja yang diwariskan secara turun-temurun, dari zaman ke zaman mesti harus terus-menerus dijaga oleh *toparenge* ' supaya tidak kabur maknanya yang begitu mendalam dalam masyarakat Toraja.

Yans Sulo Panganna' memberi penekanan ketika menafsirkan *passura* ' Toraya yang menyimbolkan *pa* ' *tanduk pampang* sebagai kepemimpinan yang berfungsi sebagai gembala.⁷³ Dengan demikian, Tokoh Adat dalam hal ini *toparenge* memiliki fungsi kepemimpinan sebagai gembala. Hal tersebut dapat dilihat pada peran *toparenge* ' atau *ambe'-ambe' tondok* dalam menjaga nilai-nilai luhur atau kearifan lokal serta memberikan petunjuk atau arahan sebagaimana warisan yang otentik dalam melaksanakan ritus-ritus atau upacara-upacara pada *rambu luka* ' maupun *rambu solo* '. Kepekaan *toparenge* ' dalam mengantisipasi hal-hal yang akan merusak atau mengaburkan nilai-nilai otentik warisan leluhur manusia Toraja tentu sangat di harapkan. Seperti judi adu kerbau dan judi sabung

⁷¹Bert Tallulembang. *Reinterpretasi & Reaktualisasi Budaya Toraja*, (Yogyakarta: Gunung Sopai, 2012). hlm. 01.

⁷²Simon Pctrus. *Budaya Spiritual Orang Toraja di Totok Tengan Mengkendek*, (Makassar: De La Macua, 2018), hlm. 31.

⁷³Yans Sulo Panganna'. *Bisikan Suci Passura ' Toraya*, (Jawa Tengah: Nugra Media, 2018), hlm. 294.

ayam yang sesungguhnya bukanlah bagian dari adat-budaya Toraja, tetapi merupakan permainan judi yang di bawah dari luar sejak perdagangan kopi jika di dalam berdasarkan sejarahnya.

1.2. Peran Kepemimpinan Pemerintah (Camat, Lurah, serta Lembang) dalam Masyarakat

Camat dan dibawahnya ada Lurah sebagai perangkat Kecamatan serta Lembang yang merupakan bagian dari pada Pemerintahan Daerah memiliki otonomi daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Salah satu peran mereka adalah menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Sehingga mereka pun bertanggung jawab dalam memperhatikan/memantau kondisi-kondisi di sekitar wilayah pemerintahannya. Dan memastikan bahwa di sekitar wilayah Pemerintahannya aman dari segala hal yang dapat merusak atau meresahkan warga masyarakat.

Dalam prinsip desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus Pemerintahan di luar urusan Pemerintah pusat.⁷⁴ Baik Camat dan Lurah sebagai perangkat Kecamatan serta Lembang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketentraman warga masyarakat di wilayah pemerintahannya. Sehingga dalam kepemimpinannya memegang peran penting baik sebagai pelayan maupun gembala. Karena disamping melayani kepentingan masyarakat juga memantau kondisi/situasi di sekitar wilayah pemerintahannya. Jika disekitar wilayah pemerintahannya terdapat hal-hal yang menooansgu atau meresahkan masyarakat, maka mereka berhak untuk memeriksa serta menghimbau supaya hal-hal tersebut jangan dilakukan. Mereka juga berkewajiban

⁷⁴<https://media.neliti.com/di> akses pada tanggal 28 Mei 2020.

mensosialisasikan sesuatu, jika terdapat hal-hai yang dapat saja mengganggu ketentraman warga masyarakat disekitar wilayah pemerintahannya.

Baik Camat dan perangkatnya, yaitu Lurah, serta Lembang yang dipilih langsung oleh masyarakat dalam suatu daerah mesti memastikan di wilayahnya tidak terjadi kriminalitas atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang berlaku. Karena itu, mereka sebagai bagian daripada Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan, juga turun ke dalam masyarakat bersosialisasi apabila terdapat hal-hal yang berbahaya dan melakukan pemeriksaan (penggrebekan) apabila ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti penyalagunaan narkoba. Tentu mereka bergandengan dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti BNN dan Kepolisian. Itulah sebabnya Pemerintah Daerah harus cermat dan teliti dalam memantau situasi atau kondisi di wilayah Pemerintahannya. Dengan demikian, mereka memegang peran pengembalaan, yakni berupaya mendidik masyarakatnya supaya mematuhi hukum yang berlaku demi ketentraman dan kesejahteraan bersama. Sebagai bagian daripada Pemerintah Daerah, maka salah-satu peran mereka adalah terus mengantisipasi atau mengupayakan tindakan pencegahan pada hal-hal yang merusak atau perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku. Tetapi, apabila terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang berlaku, maka sebagai bagian daripada Pemerintah Daerah akan mengupayakan melakukan tindakan penanganan.

1.3. Peran Kepemimpinan Tokoh Agama (Gereja) dalam Masyarakat

Ciri-ciri khusus atau khas yang menandai kepemimpinan dalam agama-agama adalah kepemimpinan rohani. Dengan demikian agama-agama sesungguhnya berperan untuk mendidik dan menumbuhkan kerohanian para pemeluknya. Atau dengan kata lain, agama-

agama bertugas menjaga moral dalam masyarakat. Namun yang menjadi fokus pembahasan kepemimpinan agama disini adalah dari kaca mata agama Kristen (Gereja). Gereja hadir dalam dunia untuk membawa orang-orang keluar dari dalam gelap menuju terang. Gereja dalam menjalankan kepemimpinannya mesti mampu menjadi “garam dan terang” (bac. Mat. 5:13-15). Kepemimpinan dalam gereja adalah kepemimpinan yang melayani.

Kepemimpinan yang melayani adalah pendekatan kepemimpinan yang ditunjukkan dan dikehendaki oleh Yesus bagi para pengikut-Nya.⁷³ Daniel Ronda, dalam bukunya yang bertajuk, *Leadership Wisdom: Antologi Hikmat Kepemimpinan*, mengatakan bahwa ada tiga pilar kepemimpinan Kristen yang utama, yaitu:

1. Kepemimpinan rohani (pemimpin spiritual): Kepemimpinan yang berlandaskan firman Tuhan. Oleh karena itu, setiap pemimpin-pemimpin Kristen mesti memiliki karakter-karakter Kristus dengan kewibawaan yang berasal dari Roh Kudus.
2. Kepemimpinan hamba: Kepemimpinan yang melayani dengan prinsip kerendahan hati.
3. Kepemimpinan transformatif: Kepemimpinan yang mampu membawa perubahan/ agen perubahan dalam kehidupan bahkan menjadi pembuat perubahan. Karena perubahan merupakan standarisasi dari pemimpin-pemimpin yang efektif.

Misi gereja dalam dunia adalah memberitakan Injil dan menghasilkan murid-murid Yesus Kristus. Dunia dipenuhi dengan orang-orang yang tersesat, yang dalam bahasa perumpamaan yang di pakai oleh Yesus, yaitu “domba yang hilang”. Umat manusia di umpamakan sebagai “domba” sehingga membutuhkan “gembala”. Apabila “domba” itu tersesat maka sulit untuk melihat jalan untuk pulang sehingga harus di cari. Sifat-sifat

⁷³Kenneth Boa, Sid Buzzelt, Bil) Perkins. *Kepemimpinan Ilahi dalam Rupa Insani*. (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2013), hlm. 14.

⁷⁶Daniel Ronda. *Leadership Wisdom: Antologi Hikmat Kepemimpinan*, (Bandung: Kalam Hidup, 2011) hlm. 10-11.

“domba” yang mudah tersesat dan ketika tersesat tidak mengetahui jalan untuk kembali pulang, maka membutuhkan gembala. Gembala bertugas menjaga dan menuntun “domba-domba” supaya tidak terpisah dari kawanan dan apabila tersesat, maka sang gembala mesti mencarinya. Jadi, fungsi gembala adalah sebagai pemimpin, dikatakan sebagai pemimpin karena berperan sebagai pengarah atau penuntun dan penjaga “domba-domba”. Karena fungsi dari pemimpin itu mengarahkan, menggerakkan, menuntun dan menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak dalam lingkungan masyarakat atau organisasi yang dipimpinnya. Demikian halnya kepemimpinan gereja membimbing dan menuntun kehidupan warga masyarakat agar tidak tersesat dan apabila tersesat mesti dibina bukannya ditinggalkan. Kepemimpinan gereja yang efektif adalah ketika mampu mentransformasi kehidupan warga masyarakat menjadi lebih baik.

Kualitas kepemimpinan rohani (Gereja) ditentukan oleh beberapa kriteria sebagaimana yang terdapat dalam 1 Timotius 3:1-7, di antara kriteria tersebut, yaitu:

“Tidak bercacat, memiliki satu isteri, dapat menahan diri, suka memberi tumpangan, bijaksana, sopan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah. pendamai, bukan hamba uang, kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, bukan seorang yang baru bertobat dan memiliki nama yang baik dalam masyarakat

Kualitas tersebut, mesti dimiliki oleh pemimpin-pemimpin rohani (Gereja), karena pemimpin-pemimpin rohani (Gereja) berperan dalam pembentukan karakter bangsa. Berdasarkan pandangan Eddie Gibbs yang mengatakan bahwa terdapat beberapa diantara pakar misiologi yang membagi misi gereja ke dalam dua mandat, yaitu: *mandat budaya*

untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri dan *mandat penginjilan* yang dikenai sebagai Amanat Agung. Gibbs mengatakan bahwa Amanat Agung tidaklah cukup berada pada penginjilan tetapi juga mesti mengantar seseorang untuk menjadi murid Yesus Kristus.⁷⁷ Tentu yang dimaksud oleh Gibbs adalah bahwa seseorang yang mengikuti teladan Yesus Kristus itulah murid yang sejati atau sebuah keberhasilan dalam melaksanakan pemuridan.

Tentu Tokoh Agama (Gereja) akan bertindak menyuarakan suara kenabiannya apabila dalam masyarakat terjadi hal-hal yang menyimpang dari ajaran-ajaran Agama (Gereja) seperti judi adu kerbau dan judi sabung ayam, *money politic*, dan penyalagunaan napza. Gereja niscaya akan membawa orang-orang keluar dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran-ajarannya. Seperti halnya, *money politic* yang sering terjadi di Toraja ketika menjelang kontestasi politik menggerakkan Tokoh Agama (Gereja) untuk mengedukasi masyarakat Toraja agar melawan *money politic* dengan menghimbau baik secara langsung maupun melalui media sosial serta mengeluarkan surat pengembalaan. Bahkan melahirkan gerakan, yang disebut gerakan *Tallu Batu Lalikan* dalam rangka melawan *money politic*. Ini menandakan bahwa Tokoh Agama (Gereja) sangat berkomitmen untuk membasmi *money politic* di Toraja dan tentunya bukan hanya itu, tetapi juga judi adu kerbau dan judi sabung ayam serta penyalagunaan napza harus di basmi demi untuk mentransformasi kehidupan menjadi lebih baik dan benar.

Di atas telah diuraikan peran kepemimpinan baik Tokoh Adat, Pemerintah, dan Tokoh Agama (Gereja), atau yang di istilahkan *Tallu Batu Lalikan*, sebagai pelayan dan gembala dalam menjaga tatanan kehidupan sosial warga masyarakat. Karena itu, unsur Tokoh Adat,

⁷⁷Eddie Gibbs. *Kepemimpinan Gereja Masa Mendatang: Membentuk dan Memperbaharui Kepemimpinan yang Mampu Bertahan dalam Zaman yang Berubah*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2010) hhn. 72.

Pemerintah, dan Tokoh Agama (Gereja), khususnya dalam mengatasi penyakit sosial seperti judi adu kerbau dan judi sabung ayam, *money politic*, dan penyalagunaan napza mesti bersinergi atau bermitra. Tiga unsur tersebut harus bersatu untuk mengatasi baik mencegah maupun menangani hal-hal yang di nilai atau di anggap sebagai penyakit sosial karena menyimpang atau melanggar dari tiga hal di bawah ini, yaitu:

1. Menyimpang dari adat asli (adat-budaya Toraja).
2. Melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Menyimpang dari ajaran-ajaran Agama (Gereja).

Dengan menyatukan Tokoh Adat, Pemerintah, dan Tokoh Agama (Gereja) dalam gerak kebersamaan untuk mengantisipasi (mencegah) maupun menangani penyakit sosial yang rentan mengganggu atau meresahkan masyarakat, maka niscaya penyakit sosial, seperti judi adu kerbau dan judi sabung ayam, *money politic*, dan penyalagunaan napza dapat teratasi. Sepertinya tiga sumber kepemimpinan tersebut, jika disatukan dalam gerak kebersamaan dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai pelayan dan gembala sudah memenuhi atau memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Karena itu. Tokoh Adat, Pemerintah, dan Tokoh Agama (Gereja) mesti bermitra atau bersama-sama bekerja dalam mengatasi penyakit sosial.